

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu proses perubahan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat dalam berbagai sektor, seperti infrastruktur, sosial, ekonomi, politik, dan aspek lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Nazarudin *et al.* 2025). Proses pembangunan tersebut berlangsung secara berkelanjutan melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta potensi sosial budaya yang dimiliki oleh masyarakat (Hermansyah *et al.* 2025). Oleh karena itu, pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat sebagai unsur penting dalam keberhasilan pembangunan (Rahma, 2020).

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga ditegaskan dalam berbagai regulasi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam proses pembangunan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan partisipasi masyarakat sebagai keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan gagasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, serta nilai-nilai lokal yang berkembang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa

pembangunan yang baik seharusnya dilaksanakan secara demokratis, transparan, dan melibatkan masyarakat secara luas (Maulinda, 2025).

Pembangunan pada tingkat lokal tidak dapat dilepaskan dari peran masyarakat sebagai pihak yang mengetahui kebutuhan, mendukung proses, dan merasakan manfaat pembangunan. Oleh karena itu, keberhasilan suatu program pembangunan desa tidak hanya bergantung pada kemampuan aparat desa, tetapi juga pada kesadaran, kepedulian, serta tanggung jawab masyarakat untuk terlibat secara aktif (Laliboso *et al.* 2024). Pembangunan desa yang dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat akan menciptakan rasa memiliki, memperkuat solidaritas sosial, serta meningkatkan keberlanjutan hasil pembangunan (Saputro & Ma'ruf, 2025). Dalam praktiknya, partisipasi masyarakat dalam pembangunan lokal dapat diwujudkan melalui berbagai bidang, salah satunya pembangunan fasilitas sosial-keagamaan. Pembangunan fasilitas tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara fisik, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperkuat hubungan sosial, nilai kebersamaan, dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu bentuk pembangunan fasilitas sosial-keagamaan yang banyak melibatkan partisipasi masyarakat adalah pembangunan masjid. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan masjid umumnya berkaitan erat dengan nilai sosial dan keagamaan yang berkembang dalam suatu wilayah. Kondisi tersebut salah satunya dapat ditemukan pada masyarakat Madura yang dikenal memiliki nilai religiusitas tinggi, terutama melalui tradisi Islam yang melekat dalam kehidupan sosial masyarakat. Keberadaan masjid dan langgar yang banyak dijumpai di Madura menjadikan wilayah ini sering dikenal dengan julukan "Pulau Sejuta Langgar" (Sibilana, 2023). Dalam kehidupan masyarakat Madura, masjid

dan langgar tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang berkumpul, pembelajaran agama, membangun hubungan sosial, serta memperkuat solidaritas masyarakat (Kholis, 2021). Oleh karena itu, pembangunan masjid dalam masyarakat Madura tidak hanya dipandang sebagai pembangunan sarana fisik, tetapi juga sebagai bagian dari proses pembangunan berbasis masyarakat yang mencerminkan kepedulian, gotong royong, dan kebersamaan masyarakat.

Nilai-nilai tersebut juga tercermin dalam pembangunan Masjid Al-Arqom di Desa Gili Timur, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Pembangunan Masjid Al-Arqom menjadi salah satu fenomena pembangunan berbasis partisipasi masyarakat karena pelaksanaannya dilakukan melalui swadaya masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Bapak Munir selaku Takmir Masjid, pembangunan Masjid Al-Arqom dilaksanakan atas keterlibatan dan dukungan masyarakat sejak tahap awal pembangunan. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Munir selaku Takmir Masjid sebagai berikut:

“Di sini kan swadaya masyarakat, dan alhamdulillah warganya rata-rata itu sadar. Mereka betul-betul menginginkan masjid yang layak. Sehingga mereka membantu pembangunan mulai dari awal.” (Wawancara, 23 Januari 2026)

Berdasarkan pernyataan tersebut, pembangunan Masjid Al-Arqom tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah, melainkan banyak ditopang oleh partisipasi dan kontribusi masyarakat. Partisipasi masyarakat terlihat dalam berbagai bentuk, seperti pemberian bantuan tenaga, dana, material, maupun dukungan sosial lainnya yang diberikan secara sukarela. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai aktor yang terlibat secara langsung dalam proses pembangunan masjid.

Berdasarkan perspektif ekonomi publik, penyediaan fasilitas publik pada dasarnya merupakan tanggung jawab pemerintah karena mekanisme pasar tidak mampu menyediakan barang publik secara optimal akibat karakteristik barang publik yang bersifat *non-rival* dan *non-excludable*, serta adanya masalah *free rider* yaitu ketika masyarakat dapat menikmati manfaat dari suatu barang, jasa, program, atau kegiatan tanpa ikut menanggung biaya penyediaannya. Oleh karena itu, peran pemerintah menjadi penting sebagai penyedia utama fasilitas publik seperti jalan, jembatan, pendidikan, dan tempat ibadah (Sari & Riofita, 2025). Namun, dalam praktiknya pemerintah dihadapkan pada keterbatasan kapasitas fiskal sehingga harus menetapkan skala prioritas dalam pengalokasian anggaran. Akibatnya, tidak seluruh kebutuhan pembangunan masyarakat dapat dipenuhi melalui pembiayaan pemerintah (Wirawijaya, 2021). Dalam kondisi tersebut, partisipasi masyarakat menjadi penting sebagai bentuk dukungan terhadap penyediaan fasilitas publik keagamaan di tingkat lokal.

Fenomena pembangunan Masjid Al-Arqom menjadi menarik dikaji dalam perspektif ekonomi pembangunan karena menunjukkan bagaimana masyarakat mampu berkontribusi dalam penyediaan fasilitas publik melalui mekanisme swadaya ketika kapasitas fiskal pemerintah terbatas. Dalam perkembangannya, pengelolaan pembangunan Masjid Al-Arqom juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi sebagai upaya meningkatkan keterbukaan dan kemudahan komunikasi dengan masyarakat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan masjid dapat dilakukan melalui penyampaian informasi keuangan, pemanfaatan media publikasi, serta penggunaan sistem digital untuk mendukung tata kelola masjid yang lebih akuntabel (Sabili et al. 2023). Selain itu, penggunaan teknologi pembayaran digital seperti QRIS juga dapat mendukung

kemudahan transaksi dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana keagamaan karena transaksi dapat tercatat secara lebih sistematis (Yogi & Pelu, 2026). Dengan demikian, pembangunan Masjid Al-Arqom memiliki karakteristik menarik untuk dikaji karena tidak hanya menggambarkan kekuatan partisipasi masyarakat dalam penyediaan fasilitas publik, tetapi juga memperlihatkan pentingnya tata kelola pembangunan yang mampu membangun kepercayaan masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Antonius (2025) menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah, tetapi juga oleh keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Elvandari *et al.* (2025), juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memberikan pengaruh positif terhadap keberhasilan program pembangunan. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pembangunan desa secara umum. Penelitian yang secara khusus mengkaji partisipasi masyarakat dalam pembangunan fasilitas publik keagamaan yang dilaksanakan secara swadaya, terutama dengan menganalisis bentuk partisipasi serta tingkat partisipasi masih relatif terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk menelaah lebih dalam mengenai bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Masjid Al-Arqom. Dengan demikian, penelitian ini disusun dengan judul “Bentuk dan Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Masjid Al-Arqom di Desa Gili Timur, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat pada pembangunan Masjid Al-Arqom?
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat pada pembangunan Masjid Al-Arqom?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada pertanyaan penelitian tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis bentuk partisipasi masyarakat pada pembangunan Masjid Al-Arqom.
2. Untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat pada pembangunan Masjid Al-Arqom.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu ekonomi pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan berbasis komunitas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pembangunan.

Melalui pemahaman tersebut, masyarakat dapat memiliki kesadaran untuk terlibat secara aktif, sehingga partisipasi yang diberikan mampu membawa dampak positif bagi masyarakat itu sendiri.

b. Bagi Panitia Pembangunan Masjid Al-Arqom

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi panitia pembangunan masjid dalam memahami bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat. Dengan mengetahui sejauh mana masyarakat terlibat, panitia dapat menyusun strategi yang lebih tepat untuk meningkatkan partisipasi, memperbaiki komunikasi, serta membangun kepercayaan masyarakat dalam proses pembangunan.

c. Bagi Pemerintah atau Pihak Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah desa, kelurahan, atau pihak terkait dalam mendorong pembangunan berbasis masyarakat. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan gambaran bahwa partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam keberhasilan pembangunan.